

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL
(Studi Penertiban Gelandangan dan Pengemis)**

ABSTRAK

Oleh : M.Mukhlis Iwan Purnomo

Kata Kunci : Evaluasi, Tugas, Pamong Praja, Penegakan, Ketertiban sosial

Masalah umum gelandangan dan penemis pada hakekatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis maka diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas sehingga pembangunan akan terganggu serta cita-cita nasional tidak dapat diwujudkan. Dalam hal ini polisi Pamong Praja merupakan instansi yang paling bertanggung jawab karena mereka merupakan aparatur pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menegakan Peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru, serta untuk mengetahui faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian survey dimana pengertian survey dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi, dengan demikian penelitian secara kompleks adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Lokasi penelitian ini adalah di kantor satuan Polisi Pamong praja Kota Pekanbaru dengan alasan karena satuan polisi pamong praja merupakan aparat pemerintah yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban umum di wilayah kota Pekanbaru khususnya dalam menangani permasalahan gelandangan dan pengemis. Setelah semua data yang diperoleh kemudian data tersebut dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan dalam pelaksanaan tulisan ini. Selanjutnya peneliti melakukan konfirmasi melalui wawancara terhadap informan lainnya untuk bisa memperoleh data yang lebih valid. Setelah data tersebut diolah peneliti melakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kuantitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Berdasarkan analisis akhir peneliti secara keeluruhan menunjukkan bahwa kinerja satuan polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam penertiban gelandangan dan pengemis belum berjalan sesuai keinginan masyarakat kota Pekanbaru. Hal ini terlihat dari hasil rekapitulasi frekuensi tentang kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru masuk termasuk dalam interval 34-36% yang berarti cukup terlaksana.

**EVALUATION IMPLEMENTATION OF TASK OF POLICE UNIT
PROGRESS OF PEKANBARU CITY IN THE REGULATION OF
REGIONAL REGULATION NUMBER 12 YEAR 2008 ABOUT SOCIAL
INVESTIGATION
(Study of Homelessness and Beggars)**

ABSTRACT

By: M.Mukhlis Iwan Purnomo

Keywords: Evaluation, Duty, Civil Service, Enforcement, Social Order

The common problems of homeless and beggars are in essence closely related to the issue of order and security disturbing order and security in urban areas. With the development of homeless and beggars it is suspected to provide opportunities for the emergence of disruption of security and order, which in turn will disrupt the stability so that development will be disrupted and national ideals can not be realized. In this case the Pamong Praja police are the most responsible agencies because they are the regional government apparatus that is in charge of assisting the regional head in maintaining and maintaining public order and the public interest in enforcing the regional and regional regulation. Based on the background and problems described above, in this study the authors aim to know the performance of Satpol Police Unit in disciplining the homeless and beggars in the city of Pekanbaru, as well as to determine the inhibiting factors of the Civil Service Police Unit in the discipline of homeless and beggars. The type used in this study is the type of survey research where the definition of the survey is limited to the research whose data are collected from the sample over the population, thus the complex researcher is a study that takes a sample from one population using a questionnaire as a data collection tool. The location of this research is in Pekanbaru Police Precinct Unit office unit because the police officer's unit is government officer who is assigned to maintain public order in Pekanbaru city especially to handle homeless and beggar problem. After all the data obtained then the data collected and then dikelompokkan dikelompokkan to be used as input material that will be used in the implementation of this paper. Furthermore, the researcher confirmed through interview to other informant to get more valid data. After the data is processed peneliti do pembahsan against data that is quantitative in the form of deskriptif by analyzing carefully though draw conclusion and give suggestions. Based on the final analysis of the researcher as a whole it shows that the performance of Police Precinct Unit Pekanbaru in curbing homeless and beggars has not run according to the wishes of the people of Pekanbaru city. This can be seen from the result of frequency recapitulation about the performance of civil service police unit in curbing homeless and beggars in the city of Pekanbaru entrance included in interval 34-36% which means enough done.